

## **PENGARUH LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

**Fajar tri Sakti, Siti Masitoh**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nftsakti@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

*The level of effectiveness in the 2015-2016 LRA is still not able to fully use the funds available at the Bandung District Education Office. Based on the research that the Financial Report consisting of Performance Accountability in Bandung District Education Office is significant with 6.088 because  $t_{count} 6.088 > t_{table} 2.040$  then the results are "significant", with the conclusion because the value of  $t_{count} > t_{table}$  it can be said that  $H_0$  rejected means that the chance of error 0.05 or 5% can be concluded that the alternative hypothesis  $H_a$  is accepted, which means that the alternative hypothesis "Effect of Financial Statements on Performance Accountability in the Bandung District Education Office" is tested and acceptable.*

**Keywords:** *Financial Reports; Local Government; Accountability For Performance*

### **Abstrak**

Tingkat efektivitas pada LRA Tahun 2015-2016 masih belum bisa menggunakan sepenuhnya dari sumber dana yang ada Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Berdasarkan penelitian bahwa bahwa Laporan Keuangan yang terdiri dari terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah signifikan dengan 6,088 dikarenakan  $t_{hitung} 6,088 > t_{tabel} 2,040$  maka hasil tersebut "signifikan", dengan kesimpulan karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak artinya dengan peluang kesalahan 0,05 atau 5% dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternative  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa hipotesis alternative "Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung" teruji dan dapat diterima.

**Katakunci :** *Laporan keuangan, Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja*

### **A. PENDAHULUAN**

Dengan lahirnya peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pmendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang mempertanggungjawabkan keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, Pelaporan, dan Pertanggung

jawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam pelaporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas suatu laporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal akuntability*), yaitu pertanggungjawaban kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik karena Laporan Keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

Selain itu Laporan Keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan (Mahmudi, 2010:3). Kamus besar Akuntansi (2000:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan aturan hukum atau perjanjian tertentu, mardiasmo (2000) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

- a. Sumber daya finansial
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administrative

- c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan , manfaat dan efektivitas.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas , juga tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah , pemerintah dalam usaha lingkup anggaran pun menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah daerah ini, sehubungan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran.

Oleh karena itu , penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat antara pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung .

### **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono,2013: 70). Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono,2013: 71)

Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Ho:  $\rho = 0$ , 0 berarti tidak ada hubungan.

Ha:  $\rho \neq 0$ , “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol berarti ada hubungan,

$\rho$  = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho:  $\rho = 0$ , "Tidak ada pengaruh antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung".

Ha:  $\rho \neq 0$ , "Ada pengaruh antara antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung" .

Sehubungan dengan judul penelitian peneliti yaitu "Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kabupaten Bandung", hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang ditetapkan menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Definisi Administrasi

#### a. Etimologis

Secara etimologis kata Administrasi , berasal dari bahasa Latin yan berasal dari *ad + ministrare* . *Ad* artinya intensif, *ministrare* artinya *to serve* (melayani) , membantu atau memenuhi . Jadi artinya melayani secara intensif . Kemudian terbentuk kata "*administration* " (Pimpinan).

#### b. Historikal :

Dilihat dari asal usul bahwa administrasi berasal dari bahasa Belanda, Pengertian *administratie* (administrasi dalam arti sempit ) kegiatan tata usaha. Walaupun dalam bahasa Belanda sebenarnya mengandung arti luas , namun bangsa kita tidak diberi kesempatan memegang jabatan adminstrasif , melainkan bersifat *clerical work* , sehingga timbulah istilah administrasi dalam arti TATA USAHA .`

Dari bahasa Inggris administrasi , *Administrasion*, dengan asal kata *to administer* artinya *to serve* (melayani) , *to manage* (mengelola ) , atau *direct* (menggerakkan) , dengan demikian. Dalam arti luas berarti mengelola dan memberikan pelayanan.

Selanjutnya diuraikan beberapa definisi Administrasi dari beberapa ahli :

1. Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends . (John F Pfiffner, 1960) .
2. (Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya material dan sumber daya material dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan) .
3. Administration is conceived as the necessary activities of these individuals (executives) in an organization who are change with ordering . forwarding , and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defined purpose (Ordway Tead , 1954)
4. (Administrasi adalah meliputi kegiatan- kegiatan individu (eksekutif ) yan penting dalam suatu organisasi yang merubah dengan teratur, memajukan , dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama kelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan).
5. Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals (H.A Simon ,et-al, 1958 :1).
6. (Administrasi sebagai kegiatan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan tujuan bersama).
7. Administration is guidance , leadersip and control of the efforts of a group of individuals toward some common goal (William H Newman).

8. (Administrasi adalah Pembimbingan , kepemimpinan dan pengendalian usaha- usaha suatu kelompok individu kearah pencapaian tujuan bersama ).
9. Administration has to do with getting things done , with the accomplishment of defined objectives (Luther Gulick).
10. (Administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja , dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan ).
11. Administration is a process common to all group efforts, public or private ,civil or military , large scale or small scale (Leonard D White)
12. (Administrasi adalah suatu proses yang umum dalam semua usaha-usaha kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi maupun sipil atau militer dengan secara besar- besaran ataupun kecil-kecilan).
13. Dengan demikian menurut Prof. Prajudi Atmsudirdjo ,bahwa administrasi dapat ditinjau dari sudut proses ,fungsional dan institusional :
  - 1) Proses  
Segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimulai dari pada proses pemikiran , proses pelaksanaan sampai kepada proses tercapainya tujuan itu sendiri .
  - 2) Fungsional  
Didalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan itu, terdapat berbagai fungsi atau tugas,, yaitu perencanaan, tugas mengorganisir , tugas menggerakkan , tugas mengawasi atau meneliti segala kegiatan agar supaya tidak terjadi penyimpangan .
  - 3) Institusional (kepranataan / kelembagaan)

Administrasi sebagai totalitas kelembagaan dimana dalam lembaga itu terdapat kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Ditinjau dari aspek kegiatan administrasi terdapat 4 macam :

- a. *Administrator* (orang yang menetapkan);
- b. Manajer (orang yang mengendalikan / memimpin usaha);
- c. Staf ahli (membantu pemikiran untuk manajer);
- d. *Worker* (orang yang langsung bekerja ).

Sedangkan dari ciri-ciri Administrasi dapat dilihat dari 3 (tiga ) aspek:

1. Sekelompok orang ;  
Adanya orang-orang yang bekerja sama dalam wadah organisasi .
2. Adanya kerja sama ;  
Dalam administrasi kerja sama merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan bersama .
3. Tujuan  
Tujuan merupakan harapan, sasaran , target , atau pencapaian akhir bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Engkus (2017 :5)

## **2. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (PSAP :2010) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### 3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematis. Maka untuk mengikis korupsi, salah satu caranya adalah dengan membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar.

Dalam melaksanakan akuntabilitas, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak public. Hak-hak public itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002).

### 4. Dimensi akuntabilitas

Mengenai Akuntabilitas Kinerja ada 4 dimensi (Mardiasmo :2002), yaitu :

- a. Akuntabilitas Hukum dan peraturan (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan



jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dan pada dimensi ini pada stakeholder atau pihak yang membuat serta menjalankan kebijakan tersebut dituntut untuk bisa mencapai visi misi yang menjadi tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

Dalam praktiknya salah satu bentuk implementasi akuntabilitas, Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kementrian/Lembaga yang diatur oleh Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Inpers, 1999 :Nomor 7) Inpers ini menginstruksikan setiap instansi pemerintah wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) pada akhir tahun. LAK berisi pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Sudiman,Widjinarko (2004 :11).

Implementasi akuntabilitas pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap Instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil yang memberikan bukti secara empiric bahwa jika pada Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja mengacu dan mengoptimisasikannya pada teori Mahmudi dan Mardiasmo maka pada laporan keuangannya pada pertanggungjawaban dari kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung akan semakin baik. Hal tersebut mengacu kepada analisis statistic yang meliputi : analisis koefisien product moment, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, dan perhitungan uji hipotesis. kemudian setelah hasil tersebut diketahui maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil korelasi product moment menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang "Cukup" antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan presentase sebesar 0,524. pendapat tersebut mengacu kepada pendapat Guilford apabila hasil perhitungan 0,40-0,60 dinyatakan "Cukup"
- b. Hasil korelasi determinasi menjelaskan adanya hubungan antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan hasil sebesar 27,4% dengan kategori "Rendah". artinya dalam uji korelasi determinasi adanya pengaruh sebesar 27,4% antara Laporan Keuangan dan 85,1% dipengaruhi oleh factor lain.

- c. Kemudian dengan hasil regresi linier sederhana dengan rumus  $\hat{Y} = a + bX$  dengan hasil  $a = 15,626$  dan harga  $b = 0,475$ , maka diperoleh persamaan regresi  $\hat{Y} = 15,626 + 0,475 (X)$  dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) bagaimana individu dari variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel ditetapkan.
- d. Kemudian dengan hasil uji hipotesis dengan rumus  $t$  hitung dinyatakan bahwa Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah signifikan dengan  $6,088$  dikarenakan  $t$  hitung  $6,088 > t$  tabel  $2,040$  maka hasil tersebut "signifikan", dengan kesimpulan karena nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak artinya dengan peluang kesalahan  $0,05$  atau  $5\%$  dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternative  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa hipotesis alternative "Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung" teruji dan dapat diterima.

Dengan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai terkait dengan penelitian ini, baik itu pihak aparatur tersendiri seperti pegawai kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kasubag Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, mereka menggambarkan tentang Laporan Keuangan tersebut sudah berjalan namun hasil dan usaha yang dilakukan belum optimal dan masih ada dana anggaran yang telat dari pusat provinsinya itu sendiri.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kesimpulan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari Dimensi Neraca terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dimana terdapat pengaruh yang baik yaitu 78%, dengan ketentuan  $r$  hitung lebih besar dari pada  $r$  tabel ( $0,889 > 0,355$ ) dengan hipotesis ( $6,088 > 2,040$ ) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara dimensi neraca sebesar 0,889 adalah signifikan baik karena lebih dari  $r$  tabel yaitu 0,355. diperkirakan rata-rata Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berdasarkan neraca sebesar 78%.
2. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari dimensi Laporan Arus Kas terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dimana terdapat pengaruh yang baik yaitu 73%, dengan ketentuan  $r$  hitung lebih besar dari pada tabel ( $0,889 > 0,355$ ) dengan hipotesis ( $6,088 > 2,040$ ) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dengan demikian yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara dimensi Laporan Arus Kas sebesar sebesar 0,889 adalah signifikan baik karena lebih dari  $r$  tabel yaitu 0,355. diperkirakan rata-rata Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berdasarkan neraca sebesar 73%.
3. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari dimensi Laporan Atas Catatan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dimana terdapat pengaruh yang baik yaitu 78%, dengan ketentuan  $r$  hitung lebih besar dari pada tabel ( $0,889 > 0,355$ ) dengan hipotesis ( $6,088 > 2,040$ ) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dengan demikian yang dapat disimpulkan bahwa

pengaruh antara dimensi Laporan Atas Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar 0,889 adalah signifikan baik karena lebih dari  $r$  tabel yaitu 0,355. diperkirakan rata-rata Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berdasarkan neraca sebesar 78%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2012) *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka setia.
- Engkus. (2017) *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik* . Bandung : FISIP UNPAS PRESS
- Engkus, E. (2017). Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.*, 18(1), 1-144.
- Engkus, E. E. (2017). Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong. *Panggung*, 27(2).
- Engkus, E., Hikmat, H., & Saminnurahmat, K. (2017). Perilaku Narsis pada Media Sosial di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- Pasolong, Harbani .(2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Soleh, Chabib . (2010). *Pengelolaan keuangan*, Bandung : Gaza Publishing
- Adisasmita, Rahardjo. (2011) *Manajemen Pemerintah Daerah* .Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta : Andi
- Pasolong, Harbani . (2012) . *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Prasetyo, Bambang . (2011) . *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta : Alfabeta
- Mahmudi. (2016) . *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rasul, Syahrudin. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta :PNRI
- Hasanudin, Buhory. (2007). *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan* . Malang : Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Bano, D. H., & Fitri, W. (2016). ANTESEDEN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading*, 12(1), 001-010.

Wardhana, G. A. S., Rasmini, N. K., & Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.